

HEGEMONI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN BULUKUMBA

Eko Rachmat Saputro¹, Anugerah Mulia Utami², Umiyati Haris³, Nurul Uswatun Hasanah⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama, Merauke, Indonesia

Email: eko.saputro@unmus.ac.id

Article History

Received: 09-09-2025

Revision: 26-09-2025

Accepted: 03-10-2025

Published: 07-10-2025

Abstract. The purpose of this research is to understand the role of each party in the management of zakat funds, which essentially are funds for the welfare of the community, using a qualitative approach with a descriptive method. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through literature studies, observation, and in-depth interviews. The data analysis technique used is qualitative data analysis, which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The analysis results indicate that the hegemony created in the management of zakat in Bulukumba Regency between the local government and BAZNAS (National Amil Zakat Agency) of Bulukumba Regency in this study can be viewed from the process of preparing the RKAT (Annual Work and Budget Plan) conducted annually. From the RKAT preparation process, the BAZNAS of the Regency must always comply with and adhere to the proposals or directives from the local government. Every year, the local government provides input to the Regency BAZNAS in the form of work plans in the fields of education, economy, health, social-humanitarian, as well as advocacy and da'wah. In addition, the local government also targets the amount of budget that must be collected by the Regency BAZNAS each year, and this budget target must be achieved.

Keywords: Hegemony, Management of Zakat

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan masing-masing pihak dalam hal pengelolaan dana zakat yang pada hakikatnya merupakan dana untuk kemaslahatan ummat melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur, observasi (pengamatan) dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hegemoni yang tercipta dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Bulukumba antara pemerintah daerah terhadap BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bulukumba dalam penelitian ini dapat ditinjau dari proses penyusunan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang dilakukan tiap tahunnya. Dari proses penyusunan RKAT tersebut BAZNAS Kabupaten harus selalu tunduk dan patuh terhadap usulan atau arahan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah tiap tahunnya memberi masukan kepada BAZNAS Kabupaten berupa rencana kerja dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial-kemanusiaan serta bidang advokasi dan dakwah. Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan jumlah anggaran yang harus dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten tiap tahunnya dan target anggaran tersebut haruslah dicapai

Kata Kunci: Hegemoni, Manajemen Zakat

How to Cite: Saputro, E. R., Utami, A. M., Haris, U., & Hasanah, N. U. (2025). Hegemoni Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bulukumba, *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (6), 9754-9759. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i6.4213>

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Kabupaten Bulukumba sedikit banyaknya telah diintervensi secara langsung oleh pemerintah daerah dengan didasarkan pada peraturan daerah (Perda) nomor 07 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat dan peraturan bupati (Perbup) nomor 47 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dalam rangka meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dimana, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012)

Pengelolaan zakat di Kabupaten Bulukumba yang diatur oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten dalam penelitian ini berfokus pada penyusunan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). Dalam proses penyusunan RKAT tersebut tercipta sebuah hegemoni oleh pemerintah daerah terhadap BAZNAS Kabupaten sebagaimana yang dicetuskan oleh Antonio Gramsci. Namun, hegemoni yang dimaksud bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (Soegiharti, 2009)

Hegemoni yang dilakukan pemerintah daerah dalam proses penyusunan RKAT di BAZNAS Kabupaten Bulukumba merupakan bentuk konsensus yang didalamnya ada ketertundukan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten melalui penguasaan atas ideologi dari pemerintah daerah dalam hal ini selaku pihak yang menghegemoni. Secara tidak sadar BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bulukumba selaku lembaga bentukan pemerintah yang berwenang untuk menghimpun dana zakat sedikit banyaknya telah terhegemoni oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan sebagai salah satu diantara beberapa cita-cita pemerintah daerah untuk masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Hegemoni dalam konteks ini mengarahkan BAZNAS Kabupaten untuk tunduk dan patuh terhadap pemerintah daerah. BAZNAS Kabupaten tidak diberikan kebebasan untuk berjalan sendiri tanpa adanya arahan dan masukan dari pemerintah daerah dalam hal penyusunan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). RKAT BAZNAS merupakan naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan pada BAZNAS sebagai pengelola zakat dalam periode waktu anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tiap tahunnya (Badan Amil Zakat

Nasional, 2021). Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan zakat di Kabupaten Bulukumba dalam hal penyusunan RKAT oleh pemerintah daerah dan BAZNAS Kabupaten. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan masing-masing pihak dalam hal pengelolaan dana zakat di Kabupaten Bulukumba yang pada hakikatnya merupakan dana untuk kemaslahatan ummat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menurut Creswell yang mencoba untuk memahami, mendalami dan menerobos lebih jauh pada suatu gejala sehingga dapat diperoleh simpulan yang bersifat objektif dan alamiah (Suyitno, 2018). Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur, observasi (pengamatan) dan wawancara mendalam. Adapun mengenai data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen elektronik yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan merangkum dan memilah hal-hal yang dianggap penting dan sesuai dengan tema atau objek penelitian. Adapun penyajian data dilakukan dengan menarasikan hasil literatur, pengamatan dan hasil wawancara serta dokumentasi yang telah diperoleh dalam bentuk uraian untuk memberikan kejelasan tentang kenyataan atau realitas di lapangan.

HASIL DAN DISKUSI

Hegemoni yang tercipta dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Bulukumba adalah konsensus antara pemerintah daerah dengan BAZNAS Kabupaten yang didalamnya ada ketertundukan yang dilakukan oleh BAZNAS melalui penguasaan atas ideologi dari pemerintah daerah sebagai kelas yang menghegemoni. Bentuk hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap BAZNAS Kabupaten yaitu dalam proses penyusunan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). Untuk tiap tahunnya dalam proses penyusunan RKAT, Baznas Kabupaten diberikan usulan berupa masukan oleh pemerintah daerah. RKAT yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan mendatang sudah harus selesai di tahun pada saat penyusunan RKAT dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Oktober.

Mengenai anggaran tahunan misalnya, untuk tahun 2023 pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba menargetkan BAZNAS Kabupaten untuk mengumpulkan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) sebesar Rp.10.000.000.000;. Selanjutnya, pemerintah daerah mengarahkan BAZNAS Kabupaten untuk mengumpulkan dana yang telah ditargetkan semaksimal mungkin. Untuk pengumpulan secara maksimal, pemerintah daerah melakukan pengarahan kepada BAZNAS Kabupaten untuk melaksanakan kampanye zakat dan sosialisasi zakat sebagai salah

satu strategi memaksimalkan pengumpulan. Kampanye dan sosialisasi zakat dapat dilakukan di masjid-masjid, sekolah, media sosial dan lain sebagainya. Segala bentuk usulan berupa arahan dari pemerintah daerah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten, hal ini karena mereka menganggapnya sebagai tindakan dan kebijakan yang diterima sebagai sesuatu yang wajar. Gramsci memaparkan pada dasarnya sebagian besar masyarakat belum menyadari adanya bentuk-bentuk kekuasaan di dalam kehidupan. Terdapat kelas sosial yang tidak sadar telah didominasi baik secara tubuh dan pikiran (Patria, 2009).

Kemudian, berdasarkan dari hasil wawancara mendalam, studi literatur serta observasi yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan data bahwa segala bentuk pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Bulukumba mulai dari pengumpulan, pendistribusian sampai dengan pendayagunaan zakat tidak terlepas dari campur tangan atau intervensi pemerintah daerah. Selain sebagai pengawas dari BAZNAS Kabupaten, pemerintah daerah dalam hal ini juga sebagai penentu berjalan atau tidaknya segala bentuk rencana kerja yang akan, sedang dan telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten. Dalam penyusunan rencana kerja ada lima sektor atau bidang yang diatur oleh pemerintah daerah dengan BAZNAS Kabupaten. Sektor tersebut meliputi pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan serta advokasi dan dakwah.

Table 1. Program BAZNAS Dengan Pemda Kab. Bulukumba

Sektor	Program
Pendidikan	Program kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah daerah dengan BAZNAS Kabupaten Bulukumba sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Beberapa diantara program kerja BAZNAS di bidang pendidikan meliputi bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa kurang mampu yang sedang menyusun skripsi atau tesis, bantuan pendidikan untuk mahasiswa dhuafa berprestasi minimal telah memasuki semester empat, bantuan santri Tahfizh yang sedang menempuh pendidikan di pesantren-pesantren yang terdapat di Bulukumba, bantuan bagi guru mengaji dan tahfizh yang menjalin kerja sama dengan BAZNAS dan bantuan belanja perlengkapan sekolah bagi anak-anak korban kebakaran di Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba. Beberapa program yang telah disebutkan diatas tidak terlepas dari arahan dan masukan oleh pemerintah daerah terhadap BAZNAS melalui beberapa organisasi perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.
Ekonomi	Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, pemerintah daerah dan BAZNAS Kabupaten Bulukumba membuat beberapa program kerja dalam bidang pemberdayaan ekonomi, beberapa diantaranya adalah rumah laundry, kedai mini, pemberdayaan ekonomi saudagar z-mart disabilitas, bantuan alat jahit, bantuan bahan kue, bantuan perlengkapan dan peralatan bengkel dan program mustahik pengusaha ayam krispi. Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi ini merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di

	Kabupaten Bulukumba dengan memanfaatkan zakat serta BAZNAS Kabupaten sebagai mediatornya.
Kesehatan	Dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial atas arahan pemerintah daerah bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten untuk menangani pasien yang tidak mampu dan memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Jika sebelumnya pemerintah daerah yang menangani persoalan ini 100%, tetapi setelah terjalin kolaborasi dengan BAZNAS maka beban pemerintah berkurang sekitar 30% dan dilimpahkan ke BAZNAS Kabupaten.
Sosial-Kemanusiaan	Untuk bidang sosial-kemanusiaan, BAZNAS Kabupaten Bulukumba bersama dengan pemerintah daerah cukup aktif dalam melaksanakan program kerjanya. Mulai dari program khitanan massal gratis, bantuan kemanusiaan berupa logistik kepada korban bencana alam, pelatihan mitigasi bencana, penyerahan hidangan berkah ramadhan, sedekah darah, bantuan pangan dan kursi roda untuk lansia dan gempur stunting. Kegiatan dari program-program kerja ini merupakan bentuk bantuan oleh BAZNAS Kabupaten kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan beberapa permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Bulukumba berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah sendiri.
Advokasi & Dakwah	Pada bidang ini pemerintah daerah mengarahkan Baznas Kabupaten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Bulukumba pada konteks keagamaan. Beberapa program kerja yang telah terlaksana meliputi pengajian bersama mustahik, pengajian rutin, training dakwah, supporting STQH (Seleksi Tilawatil Qura'an dan Hadist), pengajian Tarhib Ramadhan, pengajian masyarakat pedesaan, dan pelatihan penyelenggaraan jenazah.

KESIMPULAN

Hegemoni yang tercipta dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Bulukumba antara pemerintah daerah terhadap BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bulukumba dalam penelitian ini dapat ditinjau dari proses penyusunan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang dilakukan tiap tahunnya. Dari proses penyusunan RKAT tersebut BAZNAS Kabupaten harus selalu tunduk dan patuh terhadap usulan atau arahan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah tiap tahunnya memberi masukan kepada BAZNAS Kabupaten berupa rencana kerja dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial-kemanusiaan serta bidang advokasi dan dakwah. Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan jumlah anggaran yang harus dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten tiap tahunnya dan target anggaran tersebut haruslah dicapai. Namun adanya hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap BAZNAS semata-mata hanya untuk kemaslahatan ummat dalam mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan sosial di Kabupaten Bulukumba utamanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

REFERENSI

- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Periode 1 Januari - 31 Desember. [Online]. Available: <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2022/09/RKAT-BAZNAS-2022.pdf>. (accessed Jun. 20, 2023)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *UU Pengelolaan Zakat Jamin Kepastian Hukum Muzakki, Mustahik, dan LAZ*. [Online]. Available: www.mahkamahkonstitusi.go.id. (accessed Jun. 20, 2023)
- Novie Soegiharti, "Kajian Hegemoni," Thesis, Faculty of social science and political science of Indonesia University. Indonesia, 2009.
- Patria, N.d, Antonio Gramsci : Negara dan Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya. First edition. Malang : Akademia Pustaka, 2018.